

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hubungan Turki dengan Tiongkok mengalami masa kedekatan ketika Perang Dunia II. Pada saat itu, sebagaimana Turki yang kita tahu berhaluan ke Barat dan masuk ke dalam sekutu Amerika Serikat. Begitu pula dengan Tiongkok yang saat itu dibantu oleh Amerika Serikat dalam menghadapi invasi Jepang dan kemudian dapat mengusir Jepang. Karena didorong oleh satu haluan yang sama yaitu menjadi sekutu dari Amerika Serikat, maka pada tahun 1971 Turki dan Tiongkok resmi menandatangani hubungan diplomatik.¹

Pada kenyataannya, ketegangan etnis antara Han Tiongkok dan Muslim Uighur adalah apa yang menyebabkan perang di Xinjiang. Karena migran etnis Han ini adalah penutur bahasa Mandarin yang jauh lebih fasih dan lebih sering dipekerjakan oleh pemerintah Tiongkok, orang-orang etnis Han mendominasi dalam posisi tersebut. Karena ini, sejumlah besar etnis Uighur kehilangan pekerjaan dan menjadi melarat.²

Banyak warga Uighur percaya bahwa pemerintah Tiongkok menggunakan migrasi etnis Han ke Xinjiang ini sebagai dalih untuk melemahkan posisi mereka dan merebut kendali atas provinsi Xinjiang yang penting secara strategis dan kaya sumber daya. Selain itu, etnis Uighur merasa dieksploitasi oleh pertambangan di Xinjiang serta ekspor hasil bumi, yang dikendalikan dan diuntungkan oleh ras Han.

¹ Xinhua, "China, Turkey to establish strategic cooperative relationship" Chinadaily diakses 24 September 2022 pukul 09.28 http://www.chinadaily.com.cn/china/2010-10/08/content_11386689.htm

² Annual. (2011). Congressional-Executive Commission on China. U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE, 1-351.

Kedua, memaksakan identitas budaya Han pada orang-orang yang bukan Han. Menurut konstitusi Tiongkok, kebijakan negara menjunjung tinggi nilai-nilai egaliter dan akomodasionis. Aturan tidak tertulis, bagaimanapun, mengintegrasikan etnis Uighur ke dalam budaya Han yang lebih banyak. Salah satunya berkaitan dengan pedoman linguistik resmi Tiongkok. Ini membahas fakta bahwa bahasa asli Uighur berada dalam bahaya kepunahan karena banyaknya imigrasi etnis Han dan populasi etnis Han yang berkembang di Xinjiang.

Ketiga, persekusi terhadap warga Uighur terhadap etnis. Tidak hanya ada represi tindakan politik, tetapi juga aktivitas keagamaan. Pemberontakan Baren, yang menuntut keadilan pada sejumlah masalah dan memicu seruan untuk menggulingkan komunisme dan pemisahan diri adalah kesimpulan dari kekerasan dan protes yang meluas.³

Salah satu pembenaran utama bagi satu negara yang ikut campur tangan dalam perselisihan etnis lain diyakini sebagai hubungan etnis.⁴ Selain itu juga, ikatan etnis ini berdampak pada kebijakan luar negeri suatu negara.⁵ Namun, dari berbagai motif, termasuk motif emotif dan instrumental, akan mempengaruhi keputusan mereka untuk terlibat. Rasa identitas bersama atau kekerabatan adalah komponen dari dorongan afektif. Ketika ikatan dan kekerabatan ini ada,

³ Elba Damhuri, "Memahami Konflik Uighur di Xinjiang" [republika.co.id](https://www.republika.co.id/berita/pliyh6440/memahami-konflik-uighur-di-xinjiang) diakses 24 September 2022 pukul 09.28. <https://www.republika.co.id/berita/pliyh6440/memahami-konflik-uighur-di-xinjiang>

⁴ Jonathan Paquin & Michael Saideman, "Foreign Intervention in Ethnic Conflicts", www.humansecuritygateway.com/documents/ISA_foreigninterventionethnicconflict.pdf: 5 dan David R. Davis & Will H. Moore, 1997, "Ethnicity Matters: Transnational Ethnic Alliances and Foreign Policy Behaviour", *International Studies Quarterly* (1997) 41: 172

⁵ David Carment et al, 2009, "The Internationalization of Ethnic Conflict : State, Society and Synthesis", *International Studies Review* (2009) 11: 66

sekelompok individu mengembangkan perasaan sentimental dan kekeluargaan untuk kelompok lain, yang memperkuat hubungan mereka.⁶

Keputusan pemerintah dipengaruhi oleh ikatan etnis, terutama melalui tekanan publik domestik dari konstituen dan masyarakat umum.⁷ Dalam politik, konstituen memainkan peran penting dalam masyarakat demokratis dengan mendukung partai yang berkuasa. Keadaan internasional dan keuntungan finansial adalah alasan instrumental tambahan. Lingkungan internasional adalah salah satu penentu utama pembuatan kebijakan suatu negara. Kapasitas masing-masing negara berkorelasi langsung dengan keadaan dunia. Mengenai manfaat ekonomi, Jiro Okamoto mengatakan bahwa hal itu sangat penting untuk pengambilan keputusan suatu negara.⁸ Heraclides membahas faktor-faktor yang menyebabkan suatu negara campur tangan dalam perselisihan yang melibatkan hubungan etnis dan sampai pada kesimpulan bahwa, terlepas dari kenyataan bahwa terkadang keadaan emosional menjadi faktor pendorong negara guna ikut campur tangan dalam konflik ras di negara lain yang terkait dengannya, negara itu akan terus mendasarkan kebijakan luar negerinya pada prinsip-prinsip. Sebab perhitungan logis ini, jika negara percaya bahwa upaya untuk memainkan peran dalam konflik etnis terlalu mahal, berbahaya bagi negaranya, atau dukungan mereka akan berkurang jika mereka tidak dapat memberikan sumber daya/jawaban yang dibutuhkan bagi etnis yang menindas mereka di negara lain serta mencoba mengungkapkan keprihatinan mereka dengan "biaya rendah" dengan

⁶ Pierre van den Berghe, 1987 dalam Jack David Eller, "Ethnicity, Culture, And The Past", Michigan Quarterly Review Vol. XXXVI, no. 4 (Fall 1997)

⁷ Stephen M. Saideman, *The Ties That Divide: Ethnic Politics, Foreign Policy, And International Conflict*, (New York: Columbia University Press, 2001), 22

⁸ Heraclides (1991) dalam Carment, "The Internationalization of Ethnic Conflict", 70

mempelihatkan keprihatinan, bersikeras pada diskusi antara pemerintah pusat Negara serta administrasi etnis serta mencapai kesepakatan.⁹

Orang-orang Han dan Uighur sangat sensitif terhadap tekanan dari pemerintah Tiongkok atas migrasi ras Han ke daerah Xinjiang. Oleh karena itu, etnis Uighur menginginkan pemisahan diri sebagai akibat dari berbagai penyebab inisiasi yang menyebabkan puncak konflik pada Juli 2009. Akibatnya, pihak berwenang Tiongkok menculik dan menghukum 1434 Muslim Uighur, yang mengakibatkan 184 kematian dan 1700 luka-luka dari peristiwa ini.¹⁰

Kekerasan di Xinjiang tidak hanya sebagai akibat dari tekanan pemerintah tetapi juga sebagai akibat dari kebijakan Tiongkok yang menindas terhadap etnis Uighur. Bangunan masjid dan madrasah dilarang di Tiongkok pada tahun 1990. Akibatnya, pemerintah dan Muslim di Xinjiang terlibat dalam konfrontasi kekerasan.¹¹ Akibatnya, pada tahun 1949 masjid-masjid di Xinjiang hancur.

Pemerintah Tiongkok selalu menangani protes ini secara paksa dengan mengerahkan banyak pasukan di daerah Xinjiang.¹² Kerusuhan terbesar terjadi pada 2009 di Urumqi, Xinjiang, ketika terjadi pertempuran antara etnis Han dan etnis minoritas Uighur. Pemerintah Tiongkok menerapkan kebijakan migrasi internal Han ke wilayah Xinjiang sekitar tahun 1950. Sebagian besar warga Uighur dari etnis kehilangan pekerjaan mereka serta bangkrut akibat migrasi etnis Han. Pemerintah Tiongkok juga membuat keputusan untuk membatasi konten

⁹ Alexis Heraclides, *The Self-Determination of Minorities in International Relations*, (Portland, OR: Frank Class, 1991),

¹⁰ Junaidi, A. (2011). Kebijakan Politik Recep Tayyib Erdogan dan Islamisme Turki Kontemporer. IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia, 6(1), 142–200. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/view/1444>

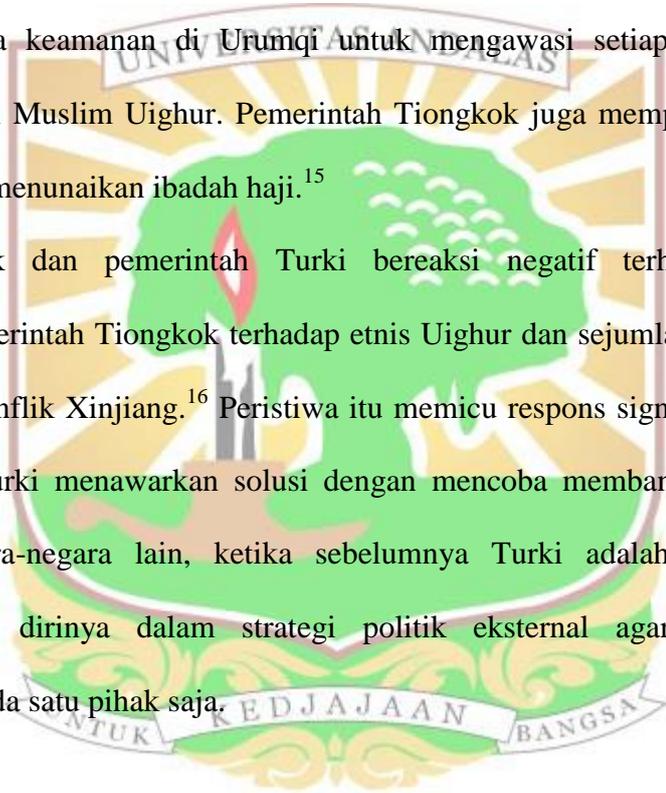
¹¹ Iqbal. (2018). Islam Di China dalam Tinjauan Historis. Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan, 2(2), 414–422.

¹² Bovingdon, “Autonomy in Xinjiang”, 9

pendidikan yang memberikan pengetahuan tentang bahasa dan budaya asli Uighur.¹³ Ambisi pemerintah Tiongkok untuk memodernisasi Kashgar, pusat budaya Uighur, membuat etnis Uighur merasa semakin tidak aman.

Selain itu, umat Islam diharuskan menandatangani pernyataan pertanggung jawaban yang berjanji untuk tidak berpuasa, tarawih, dan praktik keagamaan lainnya sepanjang bulan Ramadhan.¹⁴ Mereka akan terancam kehilangan pekerjaan jika menolak. Selain itu, pihak berwenang menyiapkan 17.000 camera keamanan di Urumqi untuk mengawasi setiap langkah yang dilakukan oleh Muslim Uighur. Pemerintah Tiongkok juga mempersulit Muslim Uighur untuk menunaikan ibadah haji.¹⁵

Publik dan pemerintah Turki bereaksi negatif terhadap tindakan menindas pemerintah Tiongkok terhadap etnis Uighur dan sejumlah besar korban jiwa dalam konflik Xinjiang.¹⁶ Peristiwa itu memicu respons signifikan di Turki. Pemerintah Turki menawarkan solusi dengan mencoba membangun kolaborasi dengan Negara-negara lain, ketika sebelumnya Turki adalah Negara yang memposisikan dirinya dalam strategi politik eksternal agar tidak terlalu bergantung pada satu pihak saja.



¹³ China Congressional-Executive Commission, Congressional-Executive Commission on China, Annual Report 2007, 10 Oktober, 2007 <http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CHRG-110hhrg38026/pdf/CHRG-110hhrg38026.pdf>

¹⁴ Muhammad, D. (2011). Masya Allah, Muslim Uighur Cina dilarang Puasa Selama Ramadhan. Republika.co.id. <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-mancanegara/11/08/09/lpmw0y-masya-allah-muslim-uighur-cina-dilarang-puasa-selama-ramadhan>

¹⁵ Subarkah, M. (2018). Jejak Derita dan Tawa Jamaah Haji Muslim Uighur di Makkah. Ihram.co.id. <https://www.ihram.co.id/berita/pjx19p385/jejak-derita-dan-tawa-jamaah-haji-muslim-uighur-di-makkah>

¹⁶ Nurahma, T. (2022). Represifitas Pemerintah Tiongkok terhadap Suku Uighur: Salahkah Jadi Minoritas? Kumparan.com. <https://kumparan.com/tarisanurahma/represifitas-pemerintah-tiongkok-terhadap-suku-uighur-salahkah-jadi-minoritas-1yFIJXKK1YI/1>

Ini juga terjadi setelah putusya hubungan dengan Israel. Turki mulai membangun kembali hubungan dengan Tiongkok pada saat ini. Salah satu isu utamanya adalah menjaga hubungan positif dengan Tiongkok. Turki akan mendapat manfaat besar secara ekonomi dari hubungan erat antara Tiongkok dan Turki. Kolaborasi perdagangan akan digunakan untuk melaksanakan beberapa kerja sama.¹⁷ Meski demikian, isu Uighur secara konsisten telah melampaui hubungan bilateral antara Turki dan Tiongkok, yang cukup jauh mengingat Beijing adalah ibu kota Tiongkok.

Hal ini ditunjukkan dengan partisipasi warga Turki yang berpartisipasi dalam unjuk rasa yang cukup besar di Istanbul pada 12 Juli 2009 yang mendukung etnis Uighur.¹⁸ Kementerian Luar Negeri Turki dengan cepat membahas masalah ini setelah kerusuhan pada Juli 2009. Turki berharap pelaku-pelaku bully bisa segera ditangkap dan diadili.¹⁹ Recep Tayyip Erdogan, selaku Perdana Menteri Turki, angkat bicara tak lama setelah itu, dan pada akhirnya pemerintahan Turki mengangkat topik tersebut masuk dalam agenda DK PBB.²⁰ Selain itu, organisasi bisnis dan serikat pekerja berpartisipasi dalam kampanye protes dan solidaritas. Turki bahkan mendorong pemerintah untuk melarang pembelian barang dari Tiongkok.²¹

¹⁷ Atilla Sandikli, *China: A New Super Power? Dimension Of Power, Energy And Security*, Bilgesam

Publication, (Istanbul: 2010), 229

¹⁸ Syahranto, M. (2009). Ribuan Orang Turki Demo Dukung Minoritas Uighur. *Republika.co.id*. <https://www.republika.co.id/berita/breaking-news/internasional/09/07/13/61863-ribuan-orang-turki-demo-dukung-minoritas-uighur>

¹⁹ Uslu, E. (2009). Ankara Anxiously Monitors the Xinjiang Crisis". <http://jamestown.org/pro-gram/ankara-anxiously-monitors-the-xinjiang-crisis/>

²⁰ Israeli, R. (2010). China's Uighur Problem. *Israel Journal of Foreign Affairs*, 4(1), 89–101.

²¹ Magdalena. (2009). Turki Serukan Boikot Produk China. <https://www.eraslim.com/berita/dunia/turki-serukan-boikot-produk-china.htm>

Ketegangan hubungan Turki dan Tiongkok dapat diredam ketika Turki mengadakan pertemuan diplomatik dengan Tiongkok pada 30 Agustus 2009. Pertemuan tersebut membahas terkait hubungan antara Turki dan Tiongkok, selain itu juga menyampaikan bagaimana pandangan Turki terkait konflik Uyghur pada bulan Juli lalu. Konferensi ini dapat dilihat sebagai upaya Turki untuk terlibat dalam diplomasi bilateral tradisional untuk membantu menyelesaikan masalah dan menenangkan warga Turki yang marah dengan perlakuan pemerintah Tiongkok terhadap warga Uighur.²²

Sikap Turki berubah sebagai hasil dari kerja sama dan kunjungan yang lebih besar, termasuk delegasi elit dari kedua negara. Karena didasarkan pada politik lokal, keuntungan ekonomi, dan keadaan global, etnisitas antara Uighur dan Turki memiliki dampak yang lebih kecil. Variabel afektif adalah variabel yang memperhitungkan hubungan sejarah, budaya, dan agama dengan suatu kelompok etnis bersama. Semakin pentingnya variabel instrumental berdampak pada seberapa lemah hubungan etnis dalam penyesuaian Turki dalam kebijakan luar negeri terhadap Tiongkok. Faktor instrumental yang relevan termasuk politik nasional, peristiwa dunia, dan keuntungan ekonomi.

Kedekatan mereka satu sama lain adalah hasil dari garis keturunan bersama mereka, yang juga menumbuhkan rasa primordialisme yang kuat di antara orang Turki. Sebagai hasil dari kesamaan ini, orang Turki merasakan afinitas yang besar terhadap Turki. Salah satu lokasi utama eksodus Uighur dari Xinjiang menjadi Turki. Mengingat ekonomi yang kuat dari kebutuhan Tiongkok

²² Soleymez, M. (2017). Turkey and China: An Account of Bilateral Relations Evolution. <https://centreasia.eu/en/turkey-and-china-an-account-of-a-bilateral-relations-evolu-tion/>

dan Turki untuk memperluas pasarnya, guna memperluas ekonominya, salah satu negara yang dipandang AKP (Justice and Development Party) sebagai hal yang krusial dalam kebijakan luar negerinya adalah Tiongkok.

Perdana Menteri Tiongkok Wen Jiabao mengunjungi Turki pada tahun 2010, dan selama perjalanan inilah Tiongkok dan Turki menyatakan niat mereka untuk membentuk aliansi kerjasama strategis. Selaku Perdana Menteri di Tiongkok, beliau menyadari pengaruh dan kekuasaan Turki di komunitas internasional dan daerah sekitarnya. Delapan kesepakatan telah dicapai antara kedua pihak, dan mereka telah setuju untuk menyelesaikan perdagangan menggunakan mata uang masing-masing. \$100 miliar pada tahun 2020, naik dari US\$ 17 miliar pada tahun 2010 dan US\$ 50 miliar di tahun 2015, mereka ingin meningkatkan volume perdagangan bilateral.

Wen Jiabao, Perdana menteri Tiongkok berjanji akan mengembangkan perdagangan bilateral menjadi \$50 miliar dalam 5 tahun dan meyakinkan perusahaan-perusahaan Turki bahwa negaranya berdedikasi untuk memajukan hubungan perdagangan dan investasi dengan Turki. Pada tahun 2009, volume perdagangan gabungan kedua negara adalah \$10 miliar, dengan surplus yang menguntungkan Tiongkok. Pebisnis Turki-Tiongkok akan mengirim lebih banyak ke Turki untuk mengimpor lebih banyak produk Turki melalui komisi perdagangan guna membangun perdagangan yang seimbang dengan Turki. Karena Turki dan Tiongkok adalah jembatan yang menghubungkan kawasan Asia dan Eropa, hubungan kerja sama mereka menguntungkan ekonomi kedua negara.

Turki telah menjadi negara tujuan barang-barang Tiongkok sejak 2009.²³ Dari penjelesan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji tentang kepentingan Turki dalam penyelesaian konflik Uyghur.

1.2 Rumusan Masalah

Konflik antara pemerintah Tiongkok dan etnis Uighur, kelompok etnis minoritas terbesar di Tiongkok, sebagai akibat dari tindakan menghina adalah contoh bagaimana negara melanggar hak asasi manusia penduduknya.²⁴ Hal tersebut disebabkan oleh ketegangan yang terjadi antar etnis yaitu warga etnis Uighur muslim dan warga Tiongkok etnis Han. Tekanan dari pemerintah dan adanya deskriminasi kebijakan-kebijakan Tiongkok terhadap etnis Uighur menyebabkan etnis Uighur ingin melakukan separatisme. Turki ikut merespon terkait adanya konflik tersebut karena adanya kesamaan etnis dan juga adanya dorongan dari masyarakat Turki itu sendiri. Respon yang dilakukan oleh Turki tentunya berdampak pada hubungan bilateralnya dengan Tiongkok, namun pada tahun 2010 Turki dan Tiongkok menjalin hubungan kerjasama dibidang ekonomi dan politik. Untuk itu peneliti ingin mengkaji terkait dampak respon Turki tentang konflik di Uyghur terhadap hubungan bilateralnya dengan Tiongkok.

²³ Zulkarnain, & Ghonimah, S. N. (2020). Respon Turki Terhadap Tindakan Diskriminatif Pemerintah Cina Kepada Etnis Uighur Di Xinjiang (2009-2015). *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(10), 1215–1231.

²⁴ Hidayat, M. N. (2013). Diaspora Uyghur dan Hak Sipil di Xinjiang Cina. *Interdependence Jurnal*, 1(3), 165–179. <https://pdfs.semanticscholar.org/cc7f/26fbef10a870f075b7e51592b016098affd4.pdf>

1.3 Pertanyaan Peneliti

Pertanyaan penelitian didasarkan pada konteks dan deskripsi topik seperti yang ditunjukkan di atas, adalah: *“Apa kepentingan Turki dalam membantu muslim Uyghur yang berkonflik dengan Tiongkok?”*

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memastikan dampak respon Turki dalam penyelesaian konflik Uigur terhadap hubungan bilateral Turki dan Tiongkok.

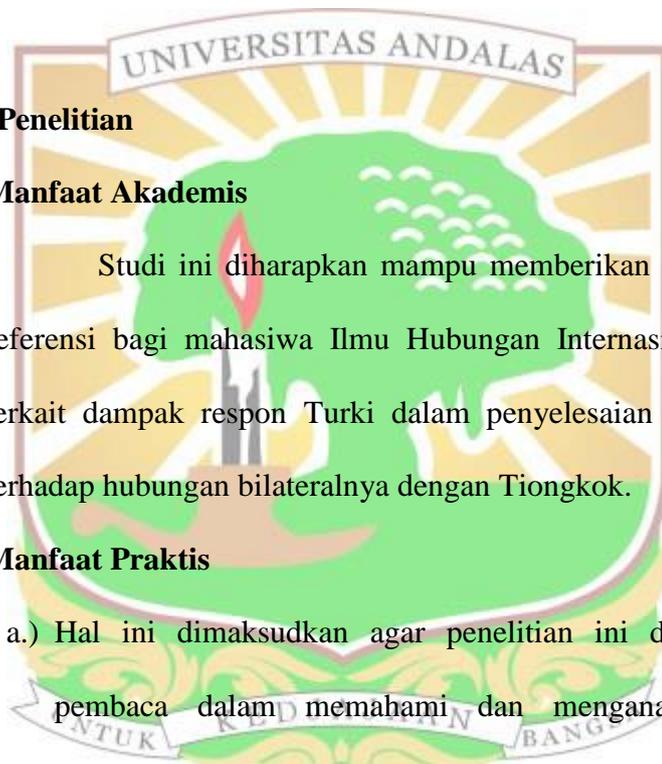
1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Studi ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan referensi bagi mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional khususnya terkait dampak respon Turki dalam penyelesaian konflik Uyghur terhadap hubungan bilateralnya dengan Tiongkok.

2. Manfaat Praktis

- a.) Hal ini dimaksudkan agar penelitian ini dapat membantu pembaca dalam memahami dan menganalisis hubungan bilateral Turki-Tiongkok, terutama mahasiswa program studi hubungan internasional.
- b.) Temuan penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi komunitas yang lebih besar yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang hubungan bilateral antara Turki dan Tiongkok dan membutuhkan referensi atau wawasan yang lebih dalam.



1.6 Studi Pustaka

Terdapat beberapa jenis literatur yang dapat digunakan sebagai bahan studi pustaka, seperti buku, jurnal, dan internet.

1.6.1 Buku

Buku adalah bentuk terbitan tulisan yang sudah melewati proses edit dari editor sebuah penerbit buku untuk memastikan isi buku benar-benar berkualitas, baik dari segi kedalaman penjelasan topik, bahasa yang digunakan, dan lain sebagainya.

1.6.2 Jurnal (Skripsi, Tesis, atau Disertasi)

Jurnal pada dasarnya adalah satu bundle publikasi yang berisi sejumlah artikel ilmiah dari beberapa penulis. Biasanya dalam satu tema sehingga memudahkan siapa saja yang membutuhkan referensi di tema tersebut.

1.6.3 Internet (web)

Sumber dari internet menjadi studi pustaka yang sering diakses. Alasannya mulai dari proses pencarian yang lebih cepat, dan menemukan lebih banyak referensi. Internet menyajikan banyak jurnal, begitu juga dengan artikel yang kredibel.

Selama proses pengumpulan bahan penelitian, penulis menemukan banyak rujukan tentang penyelidikan yang mereka gunakan sebagai panduan untuk mengumpulkan, menilai, dan mengembangkan ruang lingkup penelitian mereka sendiri.

Bahan rujukan pertama bersumber dari sebuah artikel jurnal yang berjudul “Respon Turki Terhadap Tindakan Diskriminatif Pemerintahan Cina Kepada

Etnis Uighur di Xinjiang” karya milik Siti Nida Laylia (2018). Dalam artikel jurnalnya menjelaskan terkait Organisasi internasional dan beberapa negara, khususnya Turki, telah mengkritik China atas pelanggaran hak asasi manusianya. Perlakuan terhadap Muslim di seluruh dunia, termasuk Muslim Uighur, disambut dengan sikap kontras dari Turki. Turki ingin semua Muslim diperlakukan sama dan tanpa diskriminasi dengan semua bangsa lain di dunia. Turki berusaha membangun kembali reputasinya sebagai negara Islam terkemuka di dunia dan bercita-cita untuk mengubah negaranya kembali seperti semula selama puncak kekaisaran Ottoman, selain membantu Muslim Uighur mencapai kesetaraan identitas dan keyakinan²⁵.

Bahan rujukan yang kedua melalui penelitian terdahulu tahun 2018 berupa skripsi milik Fajryan Subagya yang berjudul “Praktik Represif dan Diskriminatif Pemerintah Provinsi Xinjiang Terhadap Kelompok Minoritas Uighur” dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa kompleksitas budaya adalah salah satu faktor yang berkontribusi pada perilaku diskriminatif, dan China adalah salah satu negara yang telah mendiskriminasi etnis Uighur. Sejumlah temuan, termasuk yang berkaitan dengan pembatasan akses ke pendidikan serta agama, dan juga pengembangan kamp penahanan Uighur, adalah semua aspek kebijakan pemerintah China terhadap etnis minoritas Uighur, dapat digunakan guna membuktikan bahwa Hak asasi etnis Uighur telah dilanggar oleh pemerintah Tiongkok. Keputusan Turki untuk menanggapi praktik diskriminatif Tiongkok dimotivasi oleh ikatan budaya dan

²⁵ Pramesthi, R. K. (2018). Respon Turki Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Dilakukan Tiongkok Kepada Muslim Uighur Tahun 2018. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

agama yang ada antara etnis Proto-Turki dan etnis Uighur. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Turki menanggapi masalah yang dialami etnis Uighur di Xinjiang baik secara verbal maupun nonverbal. Respons verbal adalah jenis respons langsung yang biasanya terdiri dari deklarasi yang dibuat oleh perwakilan negara mengenai masalah yang dihadapi. Tiga balasan verbal dari Turki ke Tiongkok termasuk di bawah ini: Pernyataan resmi Turki mengenai langkah-langkah Tiongkok yang mendiskriminasi warga Uighur, Kunjungan Kenegaraan antara pemerintah Turki dan Tiongkok, dan kebijakan anti Tiongkok. Sedangkan respon non-verbal adalah jenis reaksi tidak langsung yang biasanya memerlukan perilaku keadaan yang terkait dengan masalah yang terjadi. Pesan non verbal Turki kepada Tiongkok mencakup tiga tindakan: demonstrasi komunitas; penerimaan pemerintah terhadap pengungsi Uighur; dan latihan militer bersama antara Tiongkok dan Turki.²⁶

Sedangkan bahan rujukan yang selanjutnya diambil dari skripsi yang berjudul “Islam dan Etnis Tionghoa, Studi Kasus Komunitas Cina Benteng di Tangerang” oleh Bambang Permadi (2017). Penelitian mengklaim bahwa klan Turkestan, yang sebelumnya tinggal di Asia Barat dan Asia Tengah, adalah tempat nenek moyang orang Uighur berasal. Kelompok etnis ini, yang merupakan minoritas di barat laut Republik Rakyat Tiongkok, juga sering menghadapi diskriminasi dari pemerintah. Mereka sering diklasifikasikan sebagai organisasi separatis. Setelah protes besar-besaran pada tahun 2009 yang mengakibatkan bentrokan antara etnis Han dan Uighur di provinsi Xinjiang, situasinya semakin kacau. Masalah prasangka kemudian ditangani

²⁶ Zulkarnain, & Ghonimah, S. N. (2020). RESPON TURKI TERHADAP TINDAKAN DISKRIMINATIF PEMERINTAH CINA KEPADA ETNIS UIGHUR DI XINJIANG (2009-2015). *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(10), 1215–1231.

oleh Turki, negara dengan hubungan kuno dengan orang-orang Uighur. Akibatnya, mungkin ada gesekan atas masalah ini antara Tiongkok dan Turki. Sejak awal, masalah Uighur telah menyebabkan keterasingan antara Turki dan Tiongkok, tetapi kedua belah pihak saat ini umumnya memiliki hubungan yang positif.²⁷

Kemudian bahan rujukan selanjutnya yaitu melalui penelitian terdahulu yang diambil dari artikel berupa jurnal yang berjudul “Analisis Kebijakan Luar Negeri Turki Terhadap Tiongkok Pada Masa Pemerintahan Adalet Ve Kalkinma Partisi (AKP) Tahun 2002-2013 merupakan karya milik Made Anom Wiranata, A.A serta Dewa Ayu Tania Taradewi juga Ayu Intan Parameswari yang membahas bahwa Kelompok etnis yang dikenal sebagai Uighur tinggal di Tiongkok barat. Pemerintah Tiongkok telah memberikan tekanan karena ada etnis Uighur yang berbeda dari kelompok etnis Tiongkok yang dominan dan karena mereka menolak untuk berintegrasi ke Tiongkok. Dorongan pemerintah Tiongkok mengakibatkan perlawanan dan separatis di antara etnis Uighur. Kerusuhan terbesar dalam sejarah terjadi pada 5 Juli 2009, ketika tindakan pemerintah Tiongkok memicu protes dan unjuk rasa oleh warga Uighur yang berasal dari etnis. Baik protes Perdana Menteri Erdogan maupun rakyat Turki menyebabkan tanggapan signifikan dari Turki, yang dilakukan melalui demonstrasi publik dan liputan media. Karena beberapa hubungan sejarah, budaya, bahasa, dan agama, Turki memiliki hubungan dengan Uighur. Namun, atas undangan Turki, kedua negara mengadakan latihan militer bersama pada September 2010. Ini diikuti oleh banyak

²⁷ Hakim, M. F., Arisandy, D. F., Ramadhan, M. Z., & Sambowo, J. (2021). Nationality, Ethnicity, and Solidarity: Respon Turki atas Perundingan Etnis Uighur. *Jurnal Hubungan Internasional*, 1, 158–174.

kunjungan tingkat tinggi oleh elit kedua negara, dan bahkan adanya banyak kerja sama di berbagai bidang yang dimulai oleh Turki dan Tiongkok membantu memperkuat hubungan antara kedua negara. Menurut temuan studi tersebut, pandangan Turki kepada etnis Uighur yang tinggal di daerah Xinjiang serta ikatan antara Turki dan Tiongkok dipengaruhi oleh faktor-faktor daripada yang afektif.²⁸

Bahan rujukan terakhir melalui artikel jurnal yang berjudul “China and Turkey: Closer Relations Mixed with Suspicion” karya Galia lavi, Gallia Lindenstrauss (2016) yang menjelaskan mengapa pemerintah Turki menerima tawaran pemerintah Tiongkok tentang Hubungan Kerja Sama Strategis (SCR), yang dibuat selama perjalanan 2010 ke Turki. Pemerintah Tiongkok menciptakan SCR sebagai kerangka diplomasi dalam upaya memperkuat hubungan dengan Turki. Banyak orang, terutama mereka yang mengikuti urusan luar negeri Turki, bingung dengan perjanjian tentang kerangka diplomatik SCR. Mengingat kemajuan hubungan Turki-Tiongkok yang loyo, dan yang sangat tegang pada Juli 2009 selama kerusuhan Uighur di Xinjiang. Kebijakan luar negeri Turki, di sisi lain, preferensi historis untuk Barat dan telah lama berusaha menghubungkan dirinya dengan Barat. Contohnya termasuk partisipasinya dalam NATO (Organisasi Perjanjian Atlantik Utara) pada tahun 1952 dan tawarannya untuk bergabung dengan Uni Eropa, meskipun belum diterima. Menganalisis situasi kebijakan dalam dan luar negeri Turki sebelum kesepakatan dilakukan sangat penting untuk memahami mengapa SCR disetujui oleh pemerintah Turki dan Tiongkok.

²⁸ Amelia, F. (2019). Etnisitas Dan Politik Luar Negeri Respon Turki Terhadap Penindasan Etnis Uighur Di Xinjiang. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jahi6668016e432full.pdf>

Hasilnya, penelitian ini menggunakan doktrin kedalaman strategis, ide permainan dua tingkat, dan konsep strategic cooperative relationship (SCR) itu sendiri untuk menganalisis fakta-fakta dalam diskusi. Temuan studi ini menunjukkan bahwa pemerintah Turki dan pemerintah Tiongkok masing-masing setuju dengan SCR karena pertimbangan lokal dan asing. Di tingkat domestik, pemerintah Turki berusaha memperkuat ekonomi negara itu, sementara organisasi bisnis Turki mendorong diversifikasi pasar ekspor. Tiongkok adalah mitra yang cocok untuk membantu Turki mewujudkan visi barunya, dan pemerintah Turki sangat ingin memperkuat peran Turki dalam politik internasional.²⁹

Dari beberapa bahan rujukan atau penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti ditemukan beberapa perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu terkait dampak respon Turki dalam penyelesaian konflik di Uyghur terhadap hubungan bilateralnya dengan Tiongkok

1.7 Kerangka Konseptual

1.7.1 Hubungan Bilateral

Berdasarkan landasannya, setiap negara di dunia ini tidak dapat mewujudkan apa yang diinginkannya secara individu. Oleh sebab itu, negara perlu bekerja sama dengan negara lain supaya memudahkan yang dicita-citakan bagi negara tersebut. Kerja sama yang dilakukan oleh negara mencakup banyak hal, seperti dalam bidang ekonomi, politik, budaya, pendidikan, hingga keamanan

²⁹ Rizki, F. (2016). Kesepakatan Antara Pemerintah Turki dan China dalam Strategic Cooperative Relationship pada Tahun 2010 [Universitas Gadjah Mada]. http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/106955

negara dijalin oleh negara lainnya. Kerja sama dilakukan negara sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan bersama sesuai dengan kepentingan masing-masing negara. Adapun factor yang mendorong terjadinya kerja sama internasional di antaranya: (1) untuk memenuhi persyaratan domestik; (2) penguatan ekonomi bangsa; (3) meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, dan gaya hidup masyarakat; (4) peningkatan lowongan pekerjaan; (5) menggenjot penerimaan pemerintah negara melalui ekspor; dan (6) memupuk niat baik terhadap bangsa lain.³⁰

Kerja sama negara terdiri dalam beberapa bentuk, seperti kerja sama di tingkat bilateral, multilateral, dan regional. Fokus utama konsep yang digunakan oleh peneliti adalah kerja sama bilateral. Hal tersebut dikarenakan subjek yang diteliti adalah dua negara saja. Hubungan bilateral merupakan keadaan yang mencirikan timbal balik dan pengaruh timbal balik antara dua negara.³¹

Menurut Perwita dan Yani, terdapat beberapa urutan yang terpola dalam hubungan bilateral, diantaranya: (1) rangsangan atau kebijakan aktual; (2) persepsi pengambil keputusan negara penerima tentang rangsangan tersebut; (3) tanggapan atau tindakan

³⁰ Injaya, Starlet Rallysa. (2013). Kerja Sama Internasional Indonesia dan Jepang; Peran Jepang Terhadap Isu Deforestasi di Indonesia Dalam Skema Asia Forest Partnership (AFP) Periode 2008-2011. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, hal 9

³¹ Holsti, K. J. (1998). Politik Internasional: Kerangka Untuk Analisis, Terj. M. Tahrir Azhari, Jakarta: Erlangga, hal. 653

feedback dari negara penampung; (4) persepsi/tindakan pengambil keputusan negara pemrakarsa.³²

Hubungan bilateral terus-menerus ada dalam situasi kerja sama dan konflik dalam urusan internasional. Menurut dinamika yang terjadi pada masing-masing negara, kedua pengaturan berubah sepanjang waktu secara konstan.³³ Apabila hubungan bilateral terjadi kesepakatan antar kedua belah pihak, maka yang terjadi adalah kerja sama bilateral. Sementara itu, apabila hubungan bilateral tidak menemukan titik temu, maka akan menimbulkan konflik antar kedua belah negara.

Hubungan kerja sama akan terjadi apabila suatu negara memiliki kepentingan nasional yang ingin dicapai. Sehingga kedua konteks pada hubungan bilateral akan terjadi apabila adanya titik temu atau bukan untuk kepentingan terbaik masing-masing negara yang terlibat.

1.7.2 Kepentingan Nasional

Menurut Morgenthau, dalam kutipan Antonius, kebijakan dalam menjalin hubungan internasional erat kaitannya dengan kepentingan nasional.³⁴ Dalam pandangannya, kepentingan nasional suatu negara dapat dibagi atas 2 (dua), yaitu:

1. *Core/Vital Interest/Basic.*

³² Perwita, Anak Agung Banyu dan Yanyan Mochamad Yani. (2005). Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, (Bandung: Remaja Rosdakarya), hal. 52

³³ Krisna, Didi. (1993). Kamus Politik Internasional, Jakarta: Grasindo, hal 18

³⁴ Sitepu P. Antonius. (2011). Studi Hubungan Internasional. Graha Ilmu: Yogyakarta, hal. 164

Kepentingan ini adalah kepentingan yang penting bahkan vital sebab memiliki nilai yang cukup tinggi bagi suatu negara. Sehingga jika negara tidak menjalankan kepentingan tersebut akan membahayakan stabilitas negara tersebut.

2. *Secondary Interest*

Merupakan beragamnya keinginan nasional yang membentuk kepentingan nasional suatu bangsa. Namun, ada cara lain untuk mencapainya, sehingga negara tidak perlu terlibat dalam perang. Mengenai klasifikasi dari kepentingan negara, terdapat tokoh lain yang memberikan pendapat. Salah satu tokoh yang mengkaji masalah kepentingan nasional yaitu Thomas W. Robinson, mengemukakan pendapat bahwa terdapat beberapa klasifikasi dalam kepentingan nasional, diantaranya:³⁵

1. *Primary interest*. Ini menjadi perhatian krusial yang harus dipertahankan bangsa., terlepas dari kondisi apapun. Kekhawatiran ini mencakup pelestarian budaya, politik, dan fisik bangsa.

2. *Secondary interest*. Meskipun tidak sepenting sebelumnya, namun kepentingan ini berpengaruh untuk kelangsungan eksistensi negara. Salah satu tujuan sekunder ini adalah untuk meningkatkan pengaruh negara di luar negeri. Kemudian memastikan keamanan kedutaan besar yang bekerja di luar negeri.

³⁵ Robinson, Thomas W. (1967). A National Interest Analysis of Sino-Soviet Relations. The International Studies Association. Vol. 11 No. 2, hal. 87

3. *Permanent interest*. Kepentingan ini seperti upaya negara untuk mempertahankan wilayahnya, bersifat jangka panjang, izin berubah seiring waktu, dan biasanya sulit untuk diubah.
4. *Variable interest*. Dalam keadaan tertentu, kepentingan ini mengacu pada kepentingan nasional yang dianggap krusial bagi kesejahteraan bangsa. Pada kepentingan ini, negara akan menjaga kepentingan negara jika berkaitan dengan jati diri atau kepribadian, opini publik, bagian dari kepentingan lain, dan moral politik dari suatu negara.
5. *General interest*. Kepentingan ini mencakup berbagai bidang, seperti ekonomi, kesehatan, dan keamanan. Sesuai dengan perbedaan, kepentingan ini biasanya secara umum dibutuhkan oleh negara lain juga.
6. *Specific interest*. Minat khusus ini hanya berkaitan dengan satu masalah pada waktu dan tempat tertentu.

Pendapat lain disampaikan oleh Nuechterlein bahwa dalam kepentingan nasional terdapat 4 (empat) aspek kepentingan dasar suatu negara dalam menjalankan maupun merumuskan kepentingannya, yaitu:³⁶

- a. Kepentingan pertahanan (*defence interest*)

³⁶ Tasya Safirah Ghassani, Keputusan Amerika Serikat Dalam Perjanjian Eksekutif Penempatan Kembali Pengungsi Dengan Australia Pada Tahun 2017, (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), h. 14

Pada aspek ini, sebuah negara akan mengambil keputusan. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk melindungi negara dan rakyatnya dari agresi fisik asing.

b. Kepentingan ekonomi (*economy interest*)

Pada dasarnya, kepentingan negara didasarkan pada upaya untuk meningkatkan perekonomian yang dilakukan melalui kerja sama dengan negara lain.

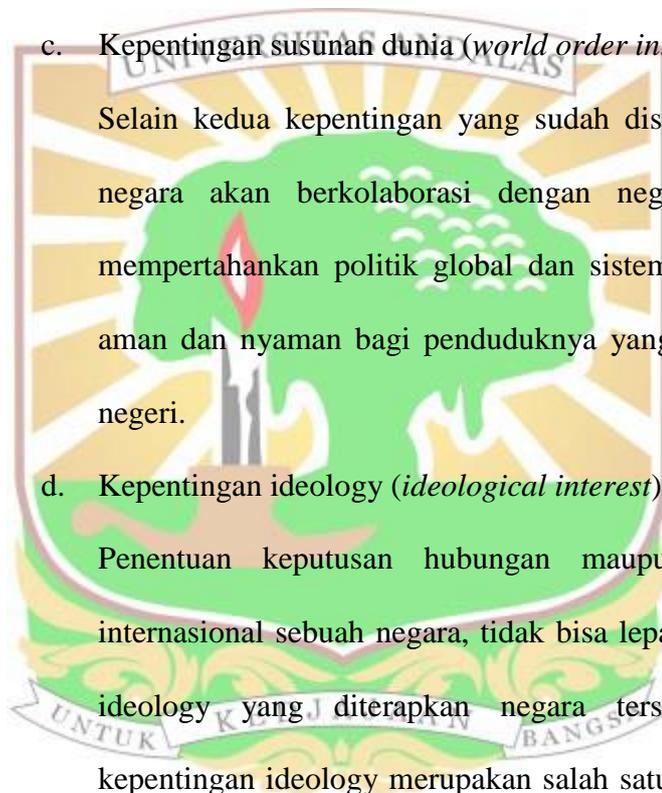
c. Kepentingan susunan dunia (*world order interest*)

Selain kedua kepentingan yang sudah disebutkan, sebuah negara akan berkolaborasi dengan negara lain untuk mempertahankan politik global dan sistem ekonomi yang aman dan nyaman bagi penduduknya yang tinggal di luar negeri.

d. Kepentingan ideology (*ideological interest*)

Penentuan keputusan hubungan maupun kerja sama internasional sebuah negara, tidak bisa lepas dari pengaruh ideology yang diterapkan negara tersebut. Sehingga kepentingan ideology merupakan salah satu alasan maupun pondasi bagi suatu negara dalam menjalankan kepentingan nasional.

Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan kerangka kepentingan nasional yang dipaparkan oleh Donald E. Nuechterlein serta dikombinasikan dengan kerangka pembagian kepentingan yang disampaikan oleh Thomas W. Robinson.



1.7.3 Pilihan Rasional

Untuk memperjelas masalah yang penulis angkat, inilah yang dimaksud dengan dampak respon Turki tentang konflik Uyghur terhadap hubungan bilateral dengan Tiongkok, maka peneliti menggunakan konsep *rational choice*. Rasional dalam KBBI berasal dari kata rasio, yang berarti logis serta sejalan dengan akal sehat orang kebanyakan. Sebaliknya, rasional digambarkan sebagai pertimbangan logis dan pikiran yang sesuai dengan akal. Dengan demikian, apa yang paling terkait dengan pemikiran rasional adalah keyakinan pribadi yang dipegang pada skala yang sehat dan rasional, juga bisa digambarkan sebagai sesuatu yang harus dilakukan sesuai dengan logika dan perilaku logis, doa yang sehat, dan keselarasan dengan kehendak ilahi. Dan oleh karena itu, yang dimaksud dengan *rational choice* adalah pilihan tertentu yang berdasarkan pada skala yang konsisten dengan logika pribadi masing-masing individu.

Adapun konsep dari *rational choice* yaitu untuk mengetahui alasan kepentingan Turki dalam membantu muslim Uyghur yang berkonflik dengan Tiongkok. Dalam hal kondisi global, Turki telah didorong untuk memikirkan hubungannya dengan Tiongkok karena adanya pengaruh Tiongkok yang berkembang sebagai kekuatan ekonomi global dan melemahnya ekonomi negara-negara Eropa. Turki telah mendapat manfaat secara ekonomi dari kemitraan strategis Tiongkok dalam beberapa hal, seperti perdagangan, pembangunan proyek kereta api yang penting bagi Turki, pengembangan Jalur Sutra Modern untuk

mempercepat perjalanan antara Asia dan Eropa, pembangunan reaktor nuklir yang dibutuhkan Turki dan bergabung dengan SCO, yang keduanya akan meningkatkan hubungan Turki dengan negara-negara Asia Tengah yang kaya energi untuk memenuhi kebutuhannya.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Peneliti memakai teknik kualitatif karena penelitian ini menghasilkan data naratif yang luas daripada data numerik untuk kesimpulannya. Kumpulan data deskriptif yang dihasilkan oleh pendekatan penelitian menggunakan kata-kata lisan dan tulisan dari subjek atau pelanggar yang diamati dikenal sebagai metode kualitatif.³⁷ Karakter deskriptif dari teknik kualitatif berusaha untuk membuat deskripsi, gambar, realita, sifat, serta ikatan faktual & akurat antara fenomena yang diteliti. Penelitian ini sangat tepat untuk digunakan ketika mempertimbangkan fokus dan tujuan penelitian karena peneliti akan mendeskripsikan data daripada mengukurnya. Dengan menggunakan rancangan kajian deskriptif, peneliti akan memperjelas dan mengevaluasi terkait dampak respon Turki dalam konflik Uyghur terhadap hubungan bilateral dengan Tiongkok.

1.8.2 Batasan Masalah

Masalah yang akan diteliti dipersempit menggunakan batas masalah, mencegah perluasan dan pengalihan materi pelajaran, dan memastikan bahwa makalah penelitian yang ditulis peneliti terfokus.

³⁷ Lexy J. moeleong. (2006). Metode Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya.

Akibatnya, penelitian terkendala pada periode 2010-2023 karena pada tahun 2010 hubungan bilateral antara Turki dan Tiongkok mulai membaik dan kedua negara tersebut telah menjalin hubungan kerjasama dibidang ekonomi dan politik dan masih berjalan hingga saat ini yaitu tahun 2023.

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Subjek/tujuan menjadi fokus penelitian dianggap sebagai unit analisis atau variabel dependen. Unit analisis penelitian, seperti yang ditulis oleh peneliti, adalah dampak respon Turki dalam penyelesaian konflik Uighur. Sementara itu, unit penjelas adalah yang mengubah perilaku unit analisis yang digunakan peneliti dalam studi mereka. Maka unit eksplanasinya adalah hubungan bilateral antara Turki dan Tiongkok. Penelitian yang ditulis oleh peneliti, bagaimanapun, memiliki tingkat analisis internasional. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa penelitian peneliti terkait dengan dampak respon Turki dalam penyelesaian konflik Uighur terhadap hubungan bilateral antara Turki dan Tiongkok merupakan permasalahan internasional.

Cara lain untuk mendalami sebuah permasalahan adalah dengan level analisis. Level analisis merupakan unit (individu, negara, atau sistem) yang menjadi fokus dari sebuah permasalahan. Dengan demikian, level analisis sangat membantu peneliti untuk mendalami unit.

Level analisis yang digunakan peneliti merupakan level analisis sistem. Level analisis sistem ini merupakan tingkat analisis paling komprehensif, karena dapat memberikan perilaku umum tentang unit

(negara) dan tingkat saling ketergantungan di antara mereka. Dalam penelitian ini, peneliti mendalami perilaku-perilaku dari negara Turki, sekaligus mendalami hubungan bilateral Turki-Tiongkok.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data dan Sumber Data

Teknik pengumpulan data berasal dari tinjauan pustaka atau penelitian kepustakaan. Penelitian yang dilakukan di perpustakaan biasanya melibatkan pengumpulan berbagai literatur, termasuk buku, catatan, dan temuan studi sebelumnya.³⁸ Akibatnya, para peneliti mencari dan mengumpulkan data sekunder tentang respon Turki dalam penyelesaian konflik Uighur serta hubungan bilateral antara Turki dan Tiongkok menggunakan berbagai sumber, termasuk tesis, jurnal, buku, majalah, makalah penelitian, situs web pemerintah, berita, dan lain-lain. Selain itu, peneliti menggunakan kata kunci untuk mengumpulkan berbagai data dari internet, misalnya konflik Uyghur, faktor penyebab konflik Uyghur, kontribusi Turki, respon Turki dalam penyelesaian konflik Uyghur, serta dampak isu etnis Uyghur terhadap hubungan bilateral antara Turki dan Tiongkok.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Menurut Miles & Huberman, teknik analisis data untuk menjawab pertanyaan penelitian terdapat empat tahapan yaitu sebagai berikut.³⁹

1. Pengumpulan Data

Pertanyaan diajukan pada langkah ini, yang juga dikenal sebagai tahap deskripsi. Peneliti sekarang menggambarkan apa

³⁸ Hasan, I. (2008). Analisis Data Penelitian Dengan Statistik. Bumi Aksara.

³⁹ Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis (Edition 3). SAGE Publications Inc.

yang telah mereka lihat, dengar, rasakan, dan tanyakan. Selanjutnya mengumpulkan data dari bermacam-macam sumber terkait dengan pertanyaan studi yang telah mereka lakukan.

2. Reduksi Data

Peneliti sekarang memadatkan beragam fakta serta sumber yang berkaitan dengan tanggapan Turki dari buku, jurnal, situs web, dan sumber lainnya dalam penyelesaian konflik Uyghur terhadap hubungan bilateralnya dengan Tiongkok dengan konsep Hubungan Bilateral dan Kepentingan Nasional. Reduksi data dilakukan dengan memutuskan sumber informasi dan data mana yang menarik, signifikan, dan berharga, informasi yang tidak berhubungan dengan topik penelitian dapat dihilangkan, dan dimungkinkan untuk mengelompokkan data yang dipilih sehingga dapat digunakan sebagai topik penelitian.

3. Penyajian Data

Selanjutnya dengan membatasi penyajian informasi yang akan diselidiki nantinya, penulis akan mendeskripsikan penekanan yang telah dikelompokkan menjadi lebih detail sehingga peneliti dapat mengambil kesimpulan secara akurat.

4. Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir yaitu penarikan kesimpulan yang harus dikonfirmasi sepanjang penelitian. Hasil yang dicapai

memberikan tanggapan terhadap pertanyaan penelitian yang diajukan. Dimana pertanyaan penelitian yakni “Apa kepentingan Turki dalam penyelesaian konflik Uyghur?”. Oleh karena itu, tanggapan atas pertanyaan yang dilakukan peneliti dan hal-hal lain akan dijelaskan di bagian kesimpulan.

1.9 Sistematika Penulisan

Untuk menganalisis penelitian ini, penulis membagi tesis menjadi lima bab. Setiap bab meliputi:

BAB I: PENDAHULUAN

Berisi pengantar dan secara sistematis akan menyampaikan pembahasan keseluruhan tesis. Ada tujuh sub-bab dalam bab ini: Latar belakang, perumusan masalah yang muncul dari latar belakang, tujuan penelitian, kerangka pemikiran yang digunakan, hipotesis, metode penelitian, ruang lingkup metode, dan penelitian sistematis.

BAB II: KONFLIK UYGHUR DI TIONGKOK

Membahas terkait asal usul suku Uyghur dan faktor yang menyebabkan timbulnya konflik Uyghur di Tiongkok.

BAB III: RESPON TURKI TERHADAP KONFLIK UYGHUR

Membahas lebih banyak hubungan dinamis antara Turki dan Tiongkok, termasuk kontribusi yang dilakukan Turki dalam upaya penyelesaian konflik Uyghur.

BAB IV: ANALISIS HUBUNGAN BILATERAL ANTARA TURKI DAN TIONGKOK PASCA RESPON KONFLIK UYGHUR

Menganalisis secara eksplisit terkait dampak respon Turki dalam konflik Uyghur terhadap hubungan bilateral Turki dan Tiongkok. Peneliti akan menjelaskan bahwa Turki memiliki kepentingan dalam penyelesaian konflik Uyghur. Kepentingan ekonomi dan politik domestik Turki telah menjadi alasan utama yang mendorong kebijakan luar negerinya terhadap Tiongkok ketimbang nilai-nilai demokrasi Islam.

BAB V: PENUTUP

Bagian ini akan memberikan ringkasan komprehensif mengenai temuan (kesimpulan) dan rekomendasi (saran) sebagai hasil dari penelitian ini yaitu dengan menguraikan alasan dan sebab secara ringkas atas masih berjalannya kerjasama yang dilakukan antara Turki dengan Tiongkok pasca konflik Uyghur dan alasan Turki dalam menjadikan ekonomi dan politik domestic sebagai prioritas.

